



BUPATI BATANG  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG  
NOMOR 4 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 116 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dan Pasal 29 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penetapan Desa;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG

dan

BUPATI BATANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENETAPAN DESA.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Batang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Batang.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung

gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.

7. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan Batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
8. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat Batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survei di lapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.

#### Pasal 2

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk memberikan kejelasan status, kepastian hukum dan tertib administrasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Kabupaten Batang berdasarkan data wilayah administrasi Pemerintahan Desa.

#### Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

- a. memberikan pengakuan dan penghormatan atas Desa yang sudah ada dengan segenap keberagamannya di Daerah; dan
- b. memperkuat masyarakat Desa sebagai subjek pembangunan.

### BAB II RUANG LINGKUP

#### Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. penetapan Desa; dan
- b. penetapan, penegasan, dan pengesahan Batas Desa.

### BAB III PENETAPAN DESA

#### Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan 239 (dua ratus tiga puluh sembilan) Desa yang terletak di 15 (lima belas) Kecamatan di wilayah Daerah.
- (2) Setiap desa memiliki kode desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### BAB IV PENEGASAN DAN PENGESAHAN BATAS DESA

#### Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah melakukan penetapan, penegasan, dan pengesahan Batas Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penetapan, Penegasan, dan pengesahan Batas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB V  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

Batas Desa yang ditetapkan sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, masih tetap berlaku sampai dengan ditetapkannya Penetapan dan Penegasan Batas Desa sesuai dengan Peraturan Daerah ini.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati sebagai peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Batang.

Ditetapkan di Batang  
pada tanggal 2 Mei 2024

Pj. BUPATI BATANG,

ttd

LANI DWI REJEKI

Diundangkan di Batang  
pada tanggal 2 Mei 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG,

ttd

ARI YUDIANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2024 NOMOR 4

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG, PROVINSI  
JAWA TENGAH: (4-62/2024)

Salinan sesuai dengan aslinya,  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SITI GHONIYAH, S.H  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19690207 199303 2 008

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG  
NOMOR 4 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENETAPAN DESA

I. UMUM

Peraturan Daerah ini merupakan pelaksanaan dari ketentuan Pasal 116 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Selain itu, Peraturan Daerah ini juga merupakan pelaksanaan Pasal 29 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Peraturan Daerah tentang Penetapan Desa, yang memuat Penetapan, Penegasan, dan pengesahan Batas Desa yang telah ada dan mendapatkan kode desa sesuai ketentuan yang berlaku dimaksudkan untuk memberikan kejelasan status, kepastian hukum dan tertib administrasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Kabupaten Batang dalam pelaksanaan kewenangan pembangunan di Desa. Peraturan Daerah ini merupakan instrumen hukum pengakuan dan penghormatan atas Desa yang sudah ada dengan segenap keberagamannya untuk mewujudkan Desa yang maju, mandiri, dan sejahtera sesuai jati diri Desa, sekaligus memperkuat masyarakat Desa sebagai subjek pembangunan di Kabupaten Batang.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BATANG NOMOR 4

LAMPIRAN  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG  
NOMOR 4 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENETAPAN DESA

DESA DI KABUPATEN BATANG

KODE DESA	KECAMATAN	NAMA DESA	
33.25.01.2001	WONOTUNGGAL	1	Silurah
33.25.01.2002		2	Sodong
33.25.01.2003		3	Gringgingsari
33.25.01.2004		4	Kedungmalang
33.25.01.2005		5	Sendang
33.25.01.2006		6	Wonotunggal
33.25.01.2007		7	Brokoh
33.25.01.2008		8	Wates
33.25.01.2009		9	Brayo
33.25.01.2010		10	Kemligi
33.25.01.2011		11	Sigayam
33.25.01.2012		12	Kreyo
33.25.01.2013		13	Siwatu
33.25.01.2014		14	Dringo
33.25.01.2015		15	Penangkan
33.25.02.2001	BANDAR	1	Tombo
33.25.02.2002		2	Wonomerto
33.25.02.2003		3	Wonodadi
33.25.02.2004		4	Pesalakan
33.25.02.2005		5	Binangun
33.25.02.2006		6	Sidayu
33.25.02.2007		7	Toso
33.25.02.2010		8	Kluwih
33.25.02.2011		9	Wonokerto
33.25.02.2012		10	Bandar
33.25.02.2013		11	Tumbrep
33.25.02.2014		12	Tambahrejo
33.25.02.2015		13	Pucanggading
33.25.02.2016		14	Candi
33.25.02.2018		15	Wonosegoro
33.25.02.2019		16	Simpar
33.25.02.2020		17	Batiombo
33.25.03.2001	BLADO	1	Gerlang
33.25.03.2002		2	Kalitengah
33.25.03.2003		3	Kembanglangit
33.25.03.2004		4	Gondang
33.25.03.2005		5	Bismo
33.25.03.2006		6	Keteleng
33.25.03.2007		7	Kalisari
33.25.03.2009		8	Besani
33.25.03.2010		9	Wonobodro
33.25.03.2011		10	Bawang
33.25.03.2012		11	Pesantren
33.25.03.2013		12	Kambangan
33.25.03.2014		13	Keputon

KODE DESA	KECAMATAN	NAMA DESA	
33.25.03.2015		14	Blado
33.25.03.2016		15	Cokro
33.25.03.2017		16	Selopajang Barat
33.25.03.2020		17	Kalipancur
33.25.03.2021		18	Selopajang Timur
33.25.04.2001	REBAN	1	Pacet
33.25.04.2002		2	Mojotengah
33.25.04.2003		3	Cablikan
33.25.04.2004		4	Ngroto
33.25.04.2005		5	Ngadirejo
33.25.04.2006		6	Reban
33.25.04.2007		7	Tambakboyo
33.25.04.2008		8	Adinuso
33.25.04.2009		9	Kumesu
33.25.04.2010		10	Kepundung
33.25.04.2011		11	Padomasan
33.25.04.2012		12	Semampir
33.25.04.2013		13	Wonosobo
33.25.04.2014		14	Sojomerto
33.25.04.2015		15	Karanganyar
33.25.04.2016		16	Polodoro
33.25.04.2017		17	Kalisari
33.25.04.2018		18	Sukomangli
33.25.04.2019		19	Wonorojo
33.25.05.2001	BAWANG	1	Pranten
33.25.05.2002		2	Deles
33.25.05.2003		3	Gunungsari
33.25.05.2004		4	Jambangan
33.25.05.2005		5	Kebaturan
33.25.05.2006		6	Kalirejo
33.25.05.2007		7	Sangubanyu
33.25.05.2008		8	Wonosari
33.25.05.2009		9	Jlamprang
33.25.05.2010		10	Bawang
33.25.05.2011		11	Candigugur
33.25.05.2012		12	Pangempon
33.25.05.2013		13	Sidoharjo
33.25.05.2014		14	Surjo
33.25.05.2015		15	Soka
33.25.05.2016		16	Sibebek
33.25.05.2017		17	Getas
33.25.05.2018		18	Pasusukan
33.25.05.2019		19	Candirejo
33.25.05.2020		20	Purbo
33.25.06.2002	TERSONO	1	Sendang
33.25.06.2003		2	Banteng
33.25.06.2004		3	Sumurbanger
33.25.06.2005		4	Margosono
33.25.06.2006		5	Sidalang
33.25.06.2007		6	Plosowangi
33.25.06.2008		7	Wanar
33.25.06.2009		8	Gondo
33.25.06.2010		9	Rejosari Barat

KODE DESA	KECAMATAN	NAMA DESA	
33.25.06.2011		10	Boja
33.25.06.2012		11	Pujut
33.25.06.2013		12	Tersono
33.25.06.2014		13	Tanjungsari
33.25.06.2015		14	Kebumen
33.25.06.2016		15	Harjowinangun Barat
33.25.06.2017		16	Tegalombo
33.25.06.2020		17	Kranggan
33.25.06.2021		18	Satriyan
33.25.06.2022		19	Harjowinangun Timur
33.25.06.2023		20	Rejosari Timur
33.25.07.2005	GRINGSING	1	Surodadi
33.25.07.2006		2	Sentul
33.25.07.2007		3	Plelen
33.25.07.2008		4	Kutosari
33.25.07.2009		5	Mentosari
33.25.07.2010		6	Gringsing
33.25.07.2011		7	Yosorejo
33.25.07.2012		8	Krengseng
33.25.07.2013		9	Sawangan
33.25.07.2014		10	Ketanggan
33.25.07.2015		11	Lebo
33.25.07.2016		12	Kebondalem
33.25.07.2017		13	Sidorejo
33.25.07.2018		14	Tedunan
33.25.07.2019		15	Madugowongjati
33.25.08.2001	LIMPUNG	1	Ngaliyan
33.25.08.2002		2	Sukorejo
33.25.08.2003		3	Tembok
33.25.08.2004		4	Donorejo
33.25.08.2005		5	Sidomulyo
33.25.08.2006		6	Kalisalak
33.25.08.2007		7	Limpung
33.25.08.2008		8	Kepuh
33.25.08.2009		9	Sempu
33.25.08.2010		10	Babadan
33.25.08.2011		11	Plumbon
33.25.08.2012		12	Amongrogo
33.25.08.2013		13	Disen
33.25.08.2015		14	Rowosari
33.25.08.2016		15	Pungangan
33.25.08.2023		16	Lobang
33.25.08.2024		17	Wonokerso
33.25.09.2004	SUBAH	1	Menjangan
33.25.09.2005		2	Karangtengah
33.25.09.2006		3	Mangunharjo
33.25.09.2007		4	Tenggulangharjo
33.25.09.2008		5	Kalimanggis
33.25.09.2009		6	Keborangan
33.25.09.2010		7	Jatisari
33.25.09.2011		8	Subah
33.25.09.2012		9	Kumejing
33.25.09.2014		10	Durenombo



KODE DESA	KECAMATAN	NAMA DESA	
33.25.09.2019		11	Clapar
33.25.09.2020		12	Adinuso
33.25.09.2021		13	Sengon
33.25.09.2023		14	Gondang
33.25.09.2024		15	Kuripan
33.25.09.2025		16	Kemiri Barat
33.25.09.2026		17	Kemiri Timur
33.25.10.2001	TULIS	1	Wringingintung
33.25.10.2002		2	Sembojo
33.25.10.2003		3	Posong
33.25.10.2004		4	Kaliboyo
33.25.10.2005		5	Simbangdesa
33.25.10.2006		6	Beji
33.25.10.2007		7	Tulis
33.25.10.2017		8	Simbangjati
33.25.10.2018		9	Kedungsegog
33.25.10.2019		10	Kenconorejo
33.25.10.2020		11	Ponowareng
33.25.10.2024		12	Siberuk
33.25.10.2025		13	Kebumen
33.25.10.2026		14	Cluwuk
33.25.10.2027		15	Jrakahpayung
33.25.10.2028		16	Jolosekti
33.25.10.2029		17	Manggis
33.25.11.2001	BATANG	1	Rowobelang
33.25.11.2002		2	Cepokokuning
33.25.11.2003		3	Pasekaran
33.25.11.2004		4	Kalisalak
33.25.11.2005		5	Kecepak
33.25.11.2006		6	Klidang Wetan
33.25.11.2007		7	Klidang Lor
33.25.11.2008		8	Kalipucang Wetan
33.25.11.2009		9	Kalipucang Kulon
33.25.11.2010		10	Karanganyar
33.25.11.2011		11	Denasri Kulon
33.25.12.2001	WARUNGASEM	1	Pandansari
33.25.12.2002		2	Kaliwareng
33.25.12.2003		3	Pejambon
33.25.12.2004		4	Sariglagah
33.25.12.2005		5	Pesaren
33.25.12.2006		6	Sidorejo
33.25.12.2007		7	Cepagan
33.25.12.2008		8	Masin
33.25.12.2009		9	Banjiran
33.25.12.2010		10	Warungasem
33.25.12.2011		11	Gapuro
33.25.12.2012		12	Kalibeluk
33.25.12.2013		13	Sawahjoho
33.25.12.2014		14	Candiareng
33.25.12.2015		15	Lebo
33.25.12.2016		16	Menguneng
33.25.12.2017		17	Terban
33.25.12.2018		18	Sijono

KODE DESA	KECAMATAN	NAMA DESA	
33.25.13.2001	KANDEMAN	1	Tegalsari
33.25.13.2002		2	Kandeman
33.25.13.2003		3	Bakalan
33.25.13.2004		4	Lawangaji
33.25.13.2005		5	Depok
33.25.13.2006		6	Tragung
33.25.13.2007		7	Cempereng
33.25.13.2008		8	Karanganom
33.25.13.2009		9	Wonokerso
33.25.13.2010		10	Ujungnegoro
33.25.13.2011		11	Karanggeneng
33.25.13.2012		12	Juragan
33.25.13.2013		13	Botolambat
33.25.14.2001	PECALUNGAN	1	Pecalungan
33.25.14.2002		2	Bandung
33.25.14.2003		3	Gombong
33.25.14.2004		4	Randu
33.25.14.2005		5	Siguci
33.25.14.2006		6	Pretek
33.25.14.2007		7	Selokarto
33.25.14.2008		8	Gemuh
33.25.14.2009		9	Gumawang
33.25.14.2010		10	Keniten
33.25.15.2001	BANYUPUTIH	1	Banyuputih
33.25.15.2002		2	Kalibalik
33.25.15.2003		3	Sembung
33.25.15.2004		4	Kedawung
33.25.15.2005		5	Dlimas
33.25.15.2006		6	Luwung
33.25.15.2008		7	Penundan
33.25.15.2009		8	Banaran
33.25.15.2010		9	Timbang
33.25.15.2011		10	Bulu
33.25.15.2012		11	Kalangsono

Pj. BUPATI BATANG,

ttd

LANI DWI REJEKI